

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

1. Letak Wilayah

Secara Geografis Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta menjadi sangat strategis sebagai kawasan pusat pertumbuhan dan pusat segala aktivitas pelayanan jasa di Provinsi DIY. dengan batas- batas wilayah , Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Sleman, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul & Sleman, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sebelah barat dengan Kabupaten Bantul & Sleman.³¹

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau 32,50 Km² (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km.

³¹ Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 Hal 1

TABEL 2.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mantrijeron	3	2.61	55	230
2	Kraton	3	1.40	43	175
3	Mergangsan	3	2.31	60	216
4	Umbulharjo	7	8.12	83	326
5	Kotagede	3	3.07	40	164
6	Gondokusuman	5	3.99	65	275
7	Danurejan	3	1.1	43	160
8	Pakualaman	2	0.63	19	83
9	Gondomanan	2	1.12	31	110
10	Ngampilan	2	0.82	21	120
11	Wirobrajan	3	1.76	34	165
12	Gedongtengen	2	0.96	37	144
13	Jetis	3	1.70	37	167
14	Tegalrejo	4	2.91	46	188
JUMLAH		45	32.5	614	2.524

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2011

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.524 Rukun Tetangga (RT). Penggunaan paling banyak diperuntukan bagi perumahan yaitu sebesar 2.103.27 Ha dan bagian kecil berupa lahan kosong seluas 20.20 Ha. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha atau sebesar 1,04% dari luas Kota

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 457.668, dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 434.212 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 23.456 orang, jadi selama 4 (empat) tahun mengalami peningkatan 5,13 %. Sedangkan prediksi jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebesar 523.191 orang.³³

TABEL 2.2
Distribusi Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan
Tahun 2007-2010

NO	Kecamatan	2007	2008	2009	2010
1	Tegalrejo	19.366	39.974	40.789	41.128
2	Jetis	15.726	31.307	31.883	31.69
3	Gondokusuman	21.535	51.442	52.545	52.586
4	Danurejan	11.666	23.617	24.114	24.327
5	Gendongtengen	11.124	22.739	23.18	23.181
6	Ngampilan	10.267	21.128	21.601	21.492
7	Wirobrajan	14.395	29.558	30.513	30.428
8	Mantrijeron	17.603	37.145	38.296	38.363
9	Kraton	11.671	24.083	24.607	24.803
10	Gondomanan	8.095	16.863	17.119	17.056
11	Pakualaman	5.723	12.077	12.32	12.078
12	Margensan	17.786	36.413	37.102	36.879
13	Umbulharjo	15.554	65.975	68.674	68.674
14	Kotagede	31.963	31.942	33.203	34.022
	Jumlah	434.212	444.236	455.946	457.668

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Tingginya laju pertumbuhan ini diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke Kota Yogyakarta dengan alasan mencari pekerjaan dan

sekolah. Mengingat Kota Yogyakarta disamping sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian (perdagangan dan jasa) serta pusat pariwisata.

Dari tabel diatas kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Umbulharjo. Sedangkan Kecamatan Pakualaman merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah

4. Kondisi Tanah dan Curah Hujan

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung berapi Merapi, mempunyai jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah Batuan Sedimen Old Andesit. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Rata-rata curah hujan tertinggi pada tahun 2009 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 474 mm dan terendah terjadi pada bulan Juli (0 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 9,92 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 83% dan terendah pada bulan September sebesar 66%. Tekanan udara rata

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Penggunaan lahan dominan dikota Yogyakarta pada tahun 2007- 2010 adalah lahan perumahan.

Hal ini sesuai dengan RT/RW Kota Yogyakarta yang dominasi guna lahan adalah perumahan/permukiman. Sedangkan guna lahan yang mengalami peningkatan adalah pada sektor jasa seperti kegiatan perdagangan dan pariwisata. Peningkata ini menggambarkan dinamika perekonomian kota Yogyakarta yang ditopang oleh sektor jasa. Sebaliknya untuk lahan pertanian, di Kota Yogyakarta luasannya sangat rendah yaitu 118,591 Ha.³⁴

TABEL 2.3

**Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Status Peruntukan Lahan
Tahun 2007-2010 Kota Yogyakarta**

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
Perumahan	2.104,357	2.106,338	2.105,108	2.105,391
Jasa	275467	275562	275713	279373
Perusahaan	275617	277565	284498	286138
Industri	52234	52234	52234	52234
Pertanian	134052	130029	124166	118591
Non Produktif	20113	20041	20113	20113
Lain- Lain	388160	388160	388118	388160
JUMLAH	3.25	3.25	3.25	3.25

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta/ Kota Yogyakarta Dalam Angka

6. Sistem Transportasi Darat

Jaringan jalan merupakan salah satu infrastruktur penunjang kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan aktivitas manusia yang lainnya. Dengan adanya jaringan jalan maka kegiatan manusia yang menghubungkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dapat terhubung dengan baik. Berdasarkan kelas jalan, jalan di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi jalan kelas I, kelas II, kelas III, kelas IIIA, kelas IIIB, kelas IIIC dan non kelas. Jalan kelas I dan II memiliki fungsi sebagai jalan arteri. Jalan kelas IIIA dan IIIB memiliki fungsi sebagai jalan kolektor. Sedangkan untuk jalan kelas IIIC memiliki fungsi sebagai jalan lokal/lingkungan. Panjang jalan terpanjang di Kota Yogyakarta adalah jalan non kelas yaitu 174,8 km. Jalan ini merupakan jalan lingkungan dan jalan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kelas jalan berikut ini :

TABEL 2.4

Data panjang jalan menurut kelas jalan kota Yogyakarta tahun 2007-2011

NO	Uraian Jalan Kota	Jalan Kota				
		2007	2008	2009	2010	2011
	Kelas Jalan					
1	KELAS I	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
2	KELAS II	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
3	KELAS III	26,22	26,22	26,22	26,22	26,22
4	KELAS IIIA	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	KELAS IIIB	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
6	KELAS IIIC	14,39	14,39	14,39	14,39	14,39
7	Non Kelas (Tidak dirinci)	174,8	174,8	174,8	174,8	174,8
	JUMLAH	247,8	247,8	247,8	248,09	248,09

Sumber : Dinas Permukiman dan Program Wilayah Kota Yogyakarta 2007-2011

Tidak ada perubahan panjang jalan yang signifikan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2007 hingga tahun 2011. Tetapi volume kendaraan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dengan panjang jalan yang sama pada tahun 2007 panjang jalan yaitu 247,8 km² dan jumlah kendaraan 290.466. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah kendaraan meningkat menjadi 344.078. Kenaikan jumlah kendaraan yang signifikan harus diikuti dengan penambahan panjang jalan. Didalam RTRW Kota Yogyakarta tahun 2009-2029, terdapat rencana pengembangan system transportasi darat untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta sehingga tidak memunculkan permasalahan seperti kemacetan dan kesemrawutan sistem transportasi darat. Data jumlah kendaraan dan panjang jalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.5

Data Panjang Jalan dan jumlah kendaraan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011

NO	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Panjang Jalan	247,8	247,8	247,8	248,09	248,09
2	Jumlah Kendaraan	290466	308426	327378	344078	243849
3	Rasio	0,000853	0,000803	0,000757	0,000721	0,001017

Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta 2007-2011 * data hingga Juni 2011

Sedangkan untuk pengembangan moda angkutan masal Kota Yogyakarta, Pengembangan moda ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan sarana transportasi perkotaan. Hingga tahun 2011, Kota Yogyakarta sudah memiliki 76 shelter aktif.³⁵

³⁵ Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 Hal 20

B. Deskripsi Perda no 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

1. Ketentuan Umum

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha meningkatkan sarana dan pra sarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang telah ada. oleh karena itu untuk pemeliharaan dan pemanfaatan jalan diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besaran Tarif Retribusi

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- b. Biaya sebagaimana meliputi pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

3. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

- a. Tarif retribusi pada Satuan Ruang parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		KAWASAN II (Rp)	KAWASAN I (Rp)
1	Truk Gandengan, sumbu III/Lebih	30.000	20.000
2	Truk Besar	20.000	15.000
3	Bus Besar	20.000	15.000
4	Truk Sedang/Box	15.000	10.000
5	Bus Sedang	15.000	10.000
6	Sedan, Jeep	2.000	1.500
7	Sepeda Motor	1.000	500
8	Sepeda Listrik	500	500
9	Sepeda	200	200

Sumber : dokumen dinas perhubungan kota Yogyakarta

- b. Tarif retribusi pada Satuan Ruang Parkir Tidak Tetap adalah sebagai berikut :

TABEL 2.7

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
		(Rp)
1	Truk Gandengan, sumbu III/Lebih	40.000
2	Truk Besar	30.000
3	Bus Besar	30.000
4	Truk Sedang/Box	20.000
5	Bus Sedang	20.000
6	Sedan, Jeep	3.000
7	Sepeda Motor	2.000
8	Sepeda Listrik	500
9	Sepeda	200

Sumber : dokumen dinas perhubungan kota yogyakarta

4. Ketentuan Pidana

- a) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- b) Pengenaan pidana tidak mengurangi kewajiban
- c) Wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- d) Tindak pidana adalah pelanggaran.
- e) Denda masuk ke Kas Daerah.

5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi, serta structural pejabat Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, terdiri dari :³⁶

a.) Kepala Dinas

b.) Sekretariat

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan

c.) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas
2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
3. Seksi Angkutan.

d.) Bidang Perparkiran, terdiri dari

1. Seksi Optimalisasi Perparkiran
2. Seksi Retribusi Parkir.

e.) Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan

1. Seksi Pengendalian Operasional
2. Seksi Bimbingan Keselamatan

f.) Unit Pelaksana Teknis

1. Pengelolaan Terminal
2. Pengujian Kendaraan Bermotor

g.) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran mempunyai fungsi penyelenggaraan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir. Bidang Perparkiran mempunyai Rincian Tugas ³⁷:

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir;
- 2) Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran dan pengelolaan retribusi parkir;
- 3) Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- 4) Menyelenggarakan optimalisasi perparkiran;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan retribusi parkir;
- 6) Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a.) Seksi Optimalisasi Perparkiran:

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran;

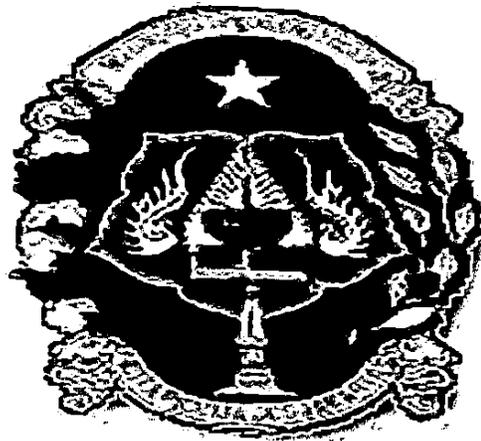
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan optimalisasi perparkiran;
- 4) Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perparkiran;
- 5) Melaksanakan penggalian potensi baru perparkiran;
- 6) Melaksanakan perencanaan dan evaluasi pendapatan perparkiran;
- 7) Merencanakan, menetapkan dan evaluasi juru parkir;
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan tempat khusus parkir di luar kepentingan perparkiran;
- 9) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tempat parkir swasta;
- 10) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan juru parkir;
- 11) Melaksanakan pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintahan;
- 12) Melaksanakan pengadaan karcis parkir dan seragam juru parkir;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan manajemen perparkiran;
- 14) Melaksanakan survey yang berkaitan dengan perparkiran;
- 15) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

b.) Seksi Retribusi Parkir

- 1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir;
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi parkir;
- 4) Melaksanakan pembinaan kepada juru parkir yang terkait dengan retribusi parkir;
- 5) Melaksanakan pemungutan dan menyetorkan retribusi parkir;
- 6) Melaksanakan pendataan yang berkaitan dengan juru parkir;
- 7) Melaksanakan perforasi karcis retribusi parkir;
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pendapatan retribusi parkir;
- 9) Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

C. Lambang Kota Yogyakarta

Gambar 2.1
Lambang Kota Yogyakarta



1. Makna Lambang dan Identitas :

Dasar Hukum Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta. Dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah telah ditetapkan pohon Kelapa Gading (*Cocos Nucifera* v.v. Gading) dan Burung Tekukur (*Streptopelia Chinensis Tigrina*) sebagai flora dan fauna identitas Kota Yogyakarta.

- a) Perbandingan ukuran 18: 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825)
- b) Warna Hitam : Simbol Keabadian
 - Warna Kuning dan Keemasan : Simbol Keluhuran
 - Warna Putih : Simbol Kesucian
 - Warna Merah : Simbol Keberanian
 - Warna Hijau : Simbol Kemakmuran

- c) Mangayu Hayuning Bawono : Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
- d) Bintang Emas : Cita-cita kesejahteraan yang dapat dicapai dengan usaha dibidang kemakmuran
 - Padi dan kapas: Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
- e) Perisai : Lambang Pertahanan
- f) Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
- g) Dua sayap : Lambang kekuatan yang harus seimbang
- h) Gunungan : Lambang kebudayaan
 - Beringin Kurung : Lambang Kerakyatan
 - Banteng : Lambang semangat keberanian
 - Keris : Lambang perjuangan
- i) Terdapat dua sengkala
 - Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta
 - Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

Masyarakat Yogyakarta, karena dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, sebagai kelengkapan pada upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat tradisional.

Burung tekukur dengan suara merdu dan sosok tubuh yang indah mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengar, menjadi kesayangan para pangeran dilingkungan kraton. Dengan mendengar suara burung tekukur dibarengi orang akan terikat benak Kota Yogyakarta

2. Visi - Misi Kota Yogyakarta

a) Visi

Berdasarkan pertumbuhan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan dan ekonomi Kerakyatan”.³⁹

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembentukan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat Keberhasilannya.

b) Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 misi pembangunan sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Rancangan RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2016 Hal 27

⁴⁰ Ibid

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

D. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

1. Profil Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta merupakan sebuah organisasi pemerintahan Daerah Propinsi DIY, Perubahan atau likuidasi organisasi yang menangani masalah transportasi di kota DIY, yaitu dari instansi yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan (DLLAJ) Kota Yogyakarta, Pembentukannya telah diatur dalam peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1994 dan pembaharuan pada peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1994.

Selanjutnya dibentuk berdasarkan Perda No 28 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Yang kemudian strukturnya mengalami perubahan bersasarkan peraturan daerah No 16 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan mendapatkan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Kota Kota Yogtakarte Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, dan melalui Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta serta Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogtakarta Nomor 77 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Yogtakarta.⁴¹

2. Makna Lambang /Logo

GAMBAR 2.2

Lambang Dinas Perhubungan



a.) Lambang Kementerian Perhubungan

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang

1. Unsur lambang tersebut terdiri dari :

- Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan
- Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor
- Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru
- Ekor warna emas lima helai
- Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan
- Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar warna biru
- Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

2. Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

- Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara
- Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan misi perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan Laut
- Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
- Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
- Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang aparat perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus sekaligus melambangkan Perhubungan Darat

b.) Logo Perhubungan

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan, Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

a.) Arti dari unsur Logo ialah :

- Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
- Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
- Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
- Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan

b.) Warna logo: terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.⁴²

3. Kedudukan dan Tugas Pokok

a. Kedudukan :

- 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparatur Kementerian berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional
- Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

3. Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

- Tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI
- 24 jam gigi roda bermaknakan aparatur perhubungan menjalankan tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat
- Lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :
 1. Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala bidang
 2. Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa Perhubungan
 3. Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan
 4. Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
 5. Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan kepribadian yang ramah
- 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-1945

Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna

luning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.⁴³

4. Visi dan Misi

a.) Visi

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah di bidang perhubungan serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah, juga didalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan maka visi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah :

”Terwujudnya Sistem Transportasi Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berwawasan Lingkungan serta gender”⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan “sistem transportasi kota yang Efektif”:

1. Penyelenggaraan sistem transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
2. Memiliki keunggulan untuk menarik masyarakat menggunakan transportasi massal
3. Mampu menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman.

⁴³ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 10 Tahun 2008.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem transportasi kota yang Akuntabel” adalah :

- Menyediakan transportasi yang bisa melayani secara kontinyu dan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem transportasi kota yang berwawasan lingkungan” adalah :

1. Menyediakan transportasi dengan emisi gas buang tidak melebihi standart minimal
2. Menyediakan pengujian kendaraan bermotor agar laik jalan.
3. Mendorong penggunaan transportasi kendaraan tidak bermotor.

Adapun yang dimaksud dengan “sistem transportasi kota yang berwawasan gender” adalah :

- Menyediakan transportasi yang mengkondisikan agar manula, defabel, serta anak-anak dan perempuan bisa merasa nyaman dan aman.

b.) Misi :

1. Meningkatkan keamanan,keselamatan,ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan..
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang transportasi jalan yang memenuhi standar pelayanan.

4. Mengembangkan sistem transportasi umum perkotaan yang handal.
5. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kinerja pegawai.
6. Membangun jaringan dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan tugas